

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MELALUI ASURANSI AGRIBISNIS GUNA Mendukung TERWUJUDNYA MDGs

Syarif Imam Hidayat
UPN "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Wajah agribisnis Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh. Ekstremnya perubahan iklim akan berdampak pada kinerja agribisnis secara keseluruhan.

Kondisi demikian makin diperburuk oleh karakteristik produk dan produksi agribisnis yang resiko dan ketidakpastiannya tinggi. Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Untuk itu, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan membangun lembaga penjamin resiko yakni asuransi sektor agribisnis formal. Prinsip asuransi adalah mempertukarkan resiko dari petani/peternak kepada lembaga penjamin asuransi, sehingga kemungkinan kegagalan produksi/produk dapat diminimalisir dan petani/peternak masih tetap eksis dalam usahatani. Upaya membangun sistem agribisnis yang kokoh dan kuat perlu didukung oleh lembaga asuransi sektor agribisnis formal, dan dalam pelaksanaannya keterlibatan, keberpihakan, serta subsidi dari pemerintah sangat diharapkan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka tulisan ini ingin mengetengahkan perlunya asuransi bidang agribisnis untuk dijadikan alternatif solusi strategis dalam menumbuhkembangkan eksistensi agribisnis di tengah lingkungan global strategis. Studi literatur dilakukan untuk menunjang tulisan disertai kajian analisis deskriptif kualitatif dari berbagai pustaka berbasis data sekunder.

Kata Kunci: agribisnis, strategi pengembangan, asuransi

PENDAHULUAN

Pada saat Indonesia ikut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) bersama 180 negara di dunia, bersepakat dan berkeinginan agar pada tahun 2015 minimal separuh angka kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan penduduk dapat ditanggulangi. Untuk itu maka upaya meningkatkan ketahanan pangan bagi setiap penduduk, daerah, dan negara menjadi tugas yang sejalan dengan rangkaian tujuan yang hendak dicapai. Terpenuhinya kebutuhan pangan menjadi hal yang sangat strategis dan utama, karena sangat berkaitan erat dengan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup setiap individu. Menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh penjuru tanah air.

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; dan banyak lagi persoalan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor pertanian.

a. Perubahan Iklim

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Meningkatnya konsentrasi CO₂ di atmosfer telah mendorong terjadinya efek rumah kaca (green house gases) sehingga suhu rata-rata bumi meningkat (global warming). Hal itu berpengaruh terhadap perilaku angin dan penguapan air laut ataupun danau, sehingga terjadi gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

b. Terbatasnya Infrastruktur, Sarana-Prasarana, Lahan dan Air Pertanian

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi

pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

c. Lemahnya Status dan Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Degradasi dan Alih Fungsi Lahan

Dari sisi skala penguasaan lahan, ternyata sejak tahun 1993, jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003 (Sensus Pertanian 2003). Adapun rata-rata kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0,96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa, dan dalam periode 1995 – 2007 rata-rata kepemilikan lahan cenderung menurun (PASEK, 2008). Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Di sisi lain, menurunnya rata-rata luas kepemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi kepemilikan lahan khususnya untuk agroekosistem persawahan di Jawa.

d. Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Swasembada beras, jagung dan tebu yang telah dicapai selama ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan yang menonjol.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah sebagai pendorong kegiatan masyarakat juga kurang menunjukkan perhatian. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

e. Terbatasnya Akses Petani Terhadap Sumber Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan perusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatnya oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih "rentenir" yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani. Melihat dan memperhatikan kondisi iklim yang begitu ekstrim serta karakteristik produksi dan produk pertanian yang *high risk* dan *uncertainty*, maka dalam tulisan ini ingin mengetengahkan perlunya asuransi

bidang agribisnis untuk dijadikan alternatif solusi strategis dalam menumbuhkembangkan eksistensi agribisnis di tengah lingkungan global strategis.

I. Sasaran Produksi Pertanian Nasional

Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut :

5. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
6. Peningkatan Diversifikasi Pangan
7. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
8. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014), Kementerian Pertanian akan lebih fokus pada peningkatan 39 komoditas unggulan nasional. Komoditas unggulan nasional tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan.

Tabel 1. Komoditas Unggulan Nasional

No	Komoditas	Pangan	Non-Pangan
1	Tanaman Pangan (7)	Padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar	
2	Hortikultura (10)	cabe, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis	rimpang, tanaman hias
3	Perkebunan (15)	sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu	karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan
4	Peternakan (7)	sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, itik	

Dari ke-39 komoditas unggulan nasional yang ingin dipacu peningkatan produksinya, ada 5 (lima) komoditas yang dijadikan target swasembada, yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Selanjutnya, lima komoditas tersebut dinamakan komoditas pangan utama. Saat ini dua komoditas pangan utama (padi dan jagung) sudah dalam posisi swasembada, sehingga ditargetkan ke depan adalah mempertahankan posisi swasembada tersebut (swasembada berkelanjutan), bahkan diharapkan bisa dijadikan komoditas ekspor. Sementara tiga komoditas pangan utama lainnya (kedelai, gula dan daging sapi) ditargetkan bisa mencapai swasembada pada tahun 2014.

Agar posisi swasembada tersebut dapat berkelanjutan, maka target peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan pertumbuhan permintaan dalam negeri. Dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk secara nasional permintaan bahan baku industri dalam negeri kebutuhan stok nasional dalam rangka stabilitas harga serta pemenuhan peluang ekspor, maka produksi padi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,70 juta ton.

Agar dapat berswasembada pada tahun 2014, untuk komoditas kedelai, gula dan daging sapi, maka target produksinya pada tahun 2014 minimal harus sama dengan proyeksi permintaan dalam negeri pada tahun 2014 tersebut, masing-masing kedelai 2,70 juta ton, gula 4,81 juta ton dan daging sapi 0,55 juta ton. Kalau melihat posisi produksi ketiga komoditas tersebut pada tahun 2009 sebesar 1,00 juta ton kedelai, 2,85 juta ton gula dan 0,40 juta ton daging sapi, maka untuk mencapai swasembada tahun 2014 masing-masing komoditas tersebut harus mampu dipacu peningkatannya rata-rata 20,05 persen (kedelai), 12,55 persen (gula) dan 7,30 persen (daging sapi) per tahun.

Tabel 2. Peningkatan Produksi Komoditas Pangan Utama, 2010-2014

No	Komoditas	Target	Produksi Th 2009 (Juta ton)	Sasaran Produksi Th 2014 (Juta ton)	Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
1	Padi	Swasembada berkelanjutan	63,84*)	75,70	3,22
2	Jagung	Swasembada berkelanjutan	17,66*)	29,00	10,02
3	Kedelai	Swasembada 2014	1,00*)	2,70	20,05
4	Gula	Swasembada 2014	2,85**)	4,81	12,55
5	Daging Sapi	Swasembada 2014	0,40**)	0,55	7,30

Keterangan : *) Angka Ramalan

***) Angka Target

Untuk komoditas pangan selain pangan utama, target pertumbuhan produksinya lebih disesuaikan dengan kemampuan petani serta daya serap pasar. Semua komoditas tetap akan ditingkatkan produksinya, tetapi laju peningkatannya sangat bervariasi antar komoditas. Walaupun secara fisik potensi peningkatan produksinya ada, tetapi peningkatan produksi yang sangat tinggi dapat saja menimbulkan kerugian bagi petani apabila terjadi *over supply* di pasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka komoditas-komoditas yang dipacu pertumbuhannya secara cukup tinggi (lebih dari 5 persen) adalah kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, mangga, durian, ayam buras dan susu. Sementara komoditas yang pertumbuhannya pada tingkat moderat (di bawah 5 persen) adalah kacang hijau, cabe, bawang merah, kentang, pisang, jeruk, manggis, kelapa, jambu mete, kambing/domba, babi dan itik.

Perkembangan Ekspor — Impor

Perkembangan neraca ekspor-impor subsektor tanaman pangan dan perkembangan ekspor-impor 5 komoditi utama sub sektor tanaman pangan periode Januari-November 2009 dibandingkan periode satu tahun sebelumnya (Januari — November 2008) dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3. Pertumbuhan Neraca Nilai Ekspor Subsektor Tanaman Pangan

Deskripsi	Nilai (ribu US\$)					Pertumbuhan 2005-2008 (%)
	2005	2006	2007	2008	2009*	
Ekspor	272.292	252.524	267.063	332.147	278.756	7,62
Impor	2.047.385	2.301.290	3.241.360	4.575.220	3.824.074	31,47
Neraca	(1.775.093)	(2.048.766)	(2.974.297)	(4.243.073)	(3.545.318)	34,42

Ket : 2009* adalah data Jan-Nov 2009

Sumber : BPS, diolah Direktorat Pemasaran Internasional, Ditjen PPHP

Sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2009, nilai impor subsektor tanaman pangan lebih besar daripada ekspornya. Nilai ekspor tumbuh sebesar 7,62% sementara nilai impornya tumbuh sebesar 31,47% untuk periode tahun 2005 — 2008.

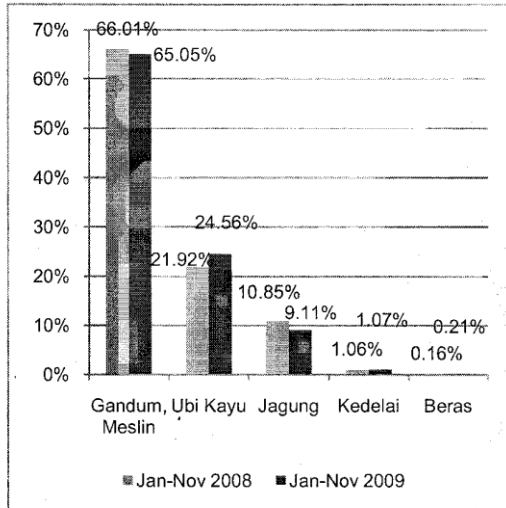
Tabel 4. Volume & Nilai Ekspor Komoditi Tanaman Pangan Indonesia

Komoditi	Volume (ton)		Δ 2008 thd 2009 (%)
	Jan-Nov 2008	Jan-Nov 2009	
Tanaman Pangan	699.240	707.760	1,22
Beras	1.068	1.341	25,58
Gandum, Meslin	443.042	422.525	-4,63
Jagung	72.797	59.184	-18,70
Kedelai	7.131	6.965	-2,32
Ubi Kayu	147.141	159.557	8,44
Lainnya	28.061	58.187	107,36
Komoditi	Volume (ton)		Δ 2008 thd 2009 (%)
	Jan-Nov 2008	Jan-Nov 2009	
Tanaman Pangan	928.374	278.756	-69,97
Beras	1.891	532	-71,88
Gandum, Meslin	615.537	185.335	-69,89
Jagung	89.649	14.117	-84,25
Kedelai	13.380	7.102	-46,92
Ubi Kayu	156.927	26.739	-82,96
Lainnya	50.991	44.931	-11,88

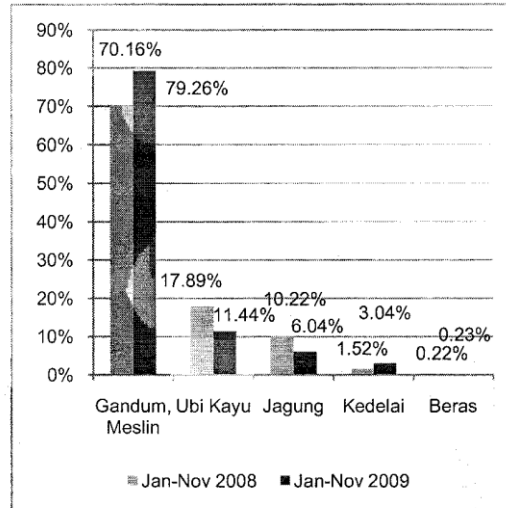
Sumber: BPS, diolah Direktorat Pemasaran internasional, Ditjen PPHP

Pada Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa volume ekspor komoditi beras periode bulan Januari — November 2009 dibanding volume ekspor pada periode yang sama tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 25,58% sementara komoditi utama tanaman pangan lainnya mengalami penurunan pada periode Januari-November 2009 dibanding volume ekspor periode yang sama tahun 2008.

Grafik 1.
Persentase Volume Ekspor
Subsektor
Tanaman Pangan Menurut
Komoditas
Jan-Nov 2008 dan 2009



Grafik 2.
Persentase Nilai Impor Subsektor
Tanaman Pangan Menurut
Komoditas
Jan-Nov 2008 dan 2009



Sumber: BPS, diolah Direktorat Pemasaran internasional, Ditjen PPHP

Tabel 5. Volume & Nilai Impor Komoditas Tanaman Pangan Indonesia

Komoditas	Volume (ton)		Δ 2008 thd 2009 (%)
	Jan-Nov 2008	Jan-Nov 2009	
Tanaman Pangan	8.910.263	9.385.292	5,33
Beras	269858	235.179	-12,85
Gandum, Meslin	4.740.629	5.037.425	6,26
Jagung	394.590	407.608	3,30
Kedelai	3.130.213	3.351.942	7,08
Ubi Kayu	157.875	148.756	-5,78
Lainnya	217.097	204.381	-5,86
Komoditas	Volume (ton)		Δ 2008 thd 2009 (%)
	Jan-Nov 2008	Jan-Nov 2009	
Tanaman Pangan	4.238.520	3.824.074	-9,78
Beras	108.792	101.598	-6,61
Gandum, Meslin	2.187.235	1.731.999	-20,81
Jagung	139.356	127.490	-8,51
Kedelai	1.620.792	1.617.026	-0,23
Ubi Kayu	58.052	44.347	-23,61
Lainnya	124.292	201.614	62,21

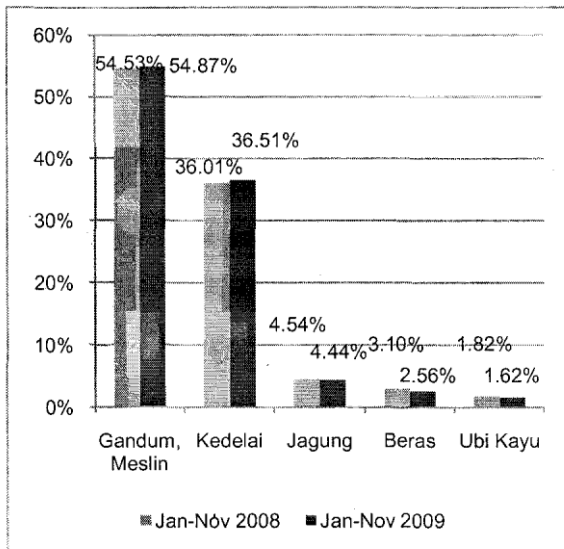
Sumber: BPS, diolah Direktorat Pemasaran internasional, Ditjen PPHP

Sementara itu untuk komoditas impor sub sektor tanaman pangan, gandum dan kedelai masih mengalami perubahan kenaikan yang signifikan antara tahun 2009 dengan tahun 2008, yaitu sebesar 6,26% dan 7%.

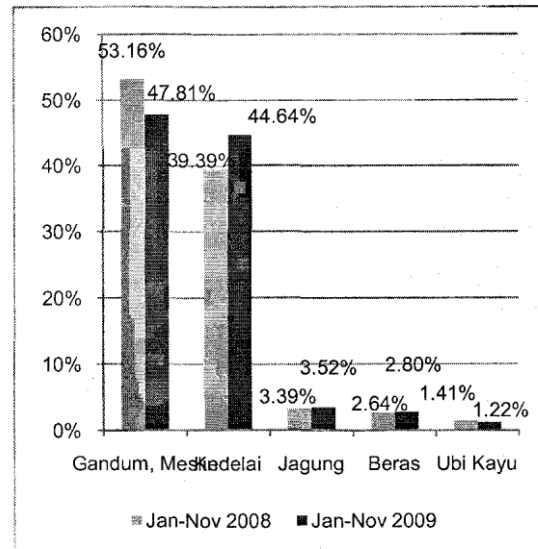
Grafik 3.

Grafik 4.

Persentase Volume Ekspor Subsektor Tanaman Pangan Menurut Komoditas Jan-Nov 2008 dan 2009



Persentase Nilai Impor Subsektor Tanaman Pangan Menurut Komoditas Jan-Nov 2008 dan 2009



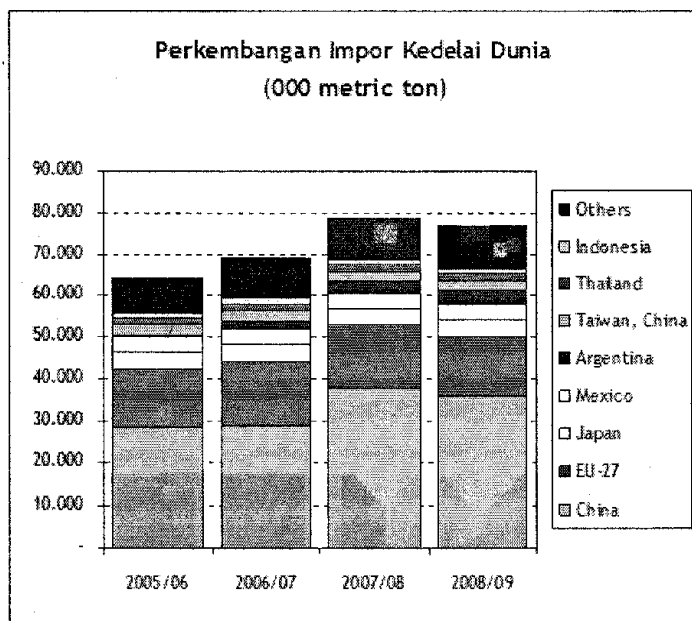
Perkembangan Impor Komoditi Kedelai Dunia

Negara	(000 metric ton)			
	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09*
China	28.317	28.726	37.812	36.000
EU-27	13.937	15.291	15.100	14.150
Japan	3.962	4.094	4.013	4.050
Mexico	3.667	3.844	3.650	3.585
Argentina	584	1.986	3.000	3.400
Taiwan, China	2.498	2.436	2.300	2.350
Thailand	1.473	1.532	1.600	1.650
Indonesia	1.187	1.309	1.200	1.300
Lainnya	8.455	9.836	10.184	10.623
Total Dunia	64.080	69.054	78.859	77.109

Ket : Kedelai dalam bentuk biji dan Olahannya

- Data Sementara

Sumber : US Departement of Agriculture dikutip dari Worldbank. Org



Gambar 47. Perkembangan Impor Komoditi Kedelai Dunia

- > Persiapan Indonesia Bergabung dalam Keanggotaan International Cocoa Organization (ICCO)
- > Potensi dan Perkembangan Pasar Ekspor Karet Indonesia di pasar Dunia
- > Pertemuan The 13 th Sub Working Group on Palm Oil, Indonesia-Malaysia
- > Pasar Pangan Organik Baru Terpenuhi Dua Persen
- > Arah Baru Kerjasama Selatan-Selatan

KEBUTUHAN TERHADAP ASURANSI AGRIBISNIS

Berdasarkan fakta, asuransi pada sektor agribisnis di negara-negara maju lebih berkembang daripada di negara-negara berkembang. Menurut Nurmanaf, dkk (2007) di Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara di Uni Eropa, asuransi pada sektor agribisnis untuk beberapa komoditas tertentu berkembang cukup pesat dan efektif sebagai sistem proteksi bagi petani/peternak. Di sejumlah negara di Asia, perkembangan asuransi pada sektor agribisnis sangat bervariasi. Asuransi pada sektor agribisnis berkembang dengan baik di Taiwan, sementara di India, Bangladesh, dan Filipina perkembangannya lambat, sedangkan di Thailand kurang berkembang. Di Indonesia, asuransi pada sektor agribisnis untuk usaha pertanian rakyat belum terbentuk. Meskipun sejak tahun 1982-1998 telah beberapa kali dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Persiapan Pengembangan Asuransi Panen, tetapi tidak berlanjut. Tahun 1999 upaya untuk mengembangkan asuransi pada sektor agribisnis dicanangkan kembali. Berbagai pembahasan yang lebih serius telah dilakukan, akan tetapi untuk melangkah ke tahap implementasi masih memerlukan sejumlah pertimbangan yang memadai. Masih banyak masukan yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan, program, perintisan, dan berbagai instrumen kelembagaan yang sesuai dengan strategi pengembangan. Selanjutnya, mengingat bahwa konstelasi nilai yang tercakup dalam asuransi pada sektor agribisnis sangat

kompleks, maka proses tercapainya suatu bentuk kelembagaan yang mapan dan berkelanjutan memerlukan proses yang panjang.

Pasaribu dkk (2010) mengemukakan bahwa sektor agribisnis termasuk salah satu jenis usaha yang resiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber resiko dan ketidakpastian yang sifatnya eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh petani/peternak) berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, atau eksplosif organisme pengganggu tanaman; dan lingkungan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan maupun keluaran usahatani, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non pertanian, inkonsistensi kebijakan di bidang ekonomi, konflik sosial, dan sebagainya.

Menyimak kecenderungan yang tengah berlangsung, diperkirakan bahwa sebagian besar sumber resiko dan ketidakpastian berasal dari perubahan iklim. Perubahan sebaran dan intensitas curah hujan menyebabkan bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor yang merupakan fenomena "rutin". Frekuensi kejadian semakin tinggi dan wilayah yang terkena bencana tersebut diperkirakan semakin luas. Pada saat yang sama, perilaku iklim yang kurang kondusif seperti itu juga meningkatkan peluang munculnya serangan hama dan penyakit tanaman. Secara tidak langsung, perubahan iklim yang kurang kondusif juga memicu intensitas faktor lingkungan sosial ekonomi sebagai sumber resiko dan ketidakpastian. Terjadinya banjir mengakibatkan prasarana transportasi rusak sehingga distribusi barang dan jasa, termasuk masukan dan keluaran usahatani menjadi tidak lancar.

Secara tradisional, para petani/peternak telah mengembangkan berbagai pendekatan praktis untuk beradaptasi dengan bencana, baik secara individual maupun berkelompok. Menyimpan sebagian hasil panen sektor agribisnis dalam lumbung, menanam umbi-umbian di pekarangan atau ladang, memelihara ternak, dan sebagainya adalah cara-cara praktis yang lazim ditempuh. Fenomena seperti itu bukan khas Indonesia, tetapi terjadi juga di negara berkembang lainnya. Dalam menghadapi resiko, strategi yang dilakukan petani/peternak satu dengan lainnya bervariasi. Secara garis besar petani/peternak menerapkan satu atau kombinasi dari beberapa strategi berikut:

1. Strategi produksi.

Dalam hal ini adalah diversifikasi atau memilih sistem usahatani yang fleksibel (biaya, pengelolaan produksi)

2. Strategi pemasaran.

Termasuk dalam metode ini seperti menjual hasil panen secara berangsur atau tidak sekaligus, memanfaatkan sistem kontrak untuk penjualan produk yang akan dihasilkan, atau melakukan perjanjian harga petani/peternak dengan pembeli tertentu untuk hasil panen yang akan datang.

3. Strategi finansial.

- a. Melakukan cadangan dana, (b) investasi pada kegiatan berdaya hasil tinggi, (c) proyeksi arus tunai pada biaya, harga jual, produksi realistis

4. Pemanfaatan kredit informal.

Dalam hal ini seperti meminjam uang atau barang kebutuhan pokok dari pihak lain (pedagang, pemilik modal perorangan).

5. Peserta asuransi pada sektor agribisnis.

Menjadi anggota asuransi pada sektor agribisnis formal untuk menutup sebagian atau semua kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Strategi ini banyak ditempuh oleh petani/peternak di negara maju, ataupun sebagian petani/peternak di negara-negara berkembang. Di Indonesia asuransi formal bidang agribisnis belum dijumpai.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada satu pertanyaan "apakah di Indonesia keberadaan asuransi pada sektor agribisnis dibutuhkan?" Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan berbagai hasil penelitian empiris, namun sampai saat ini penelitian dimaksud belum terkompilasi dengan baik. Meskipun menggunakan pendekatan yang cukup komprehensif, tetapi hasil penelitiannya baru sampai pada identifikasi faktor-faktor yang mengindikasikan bahwa asuransi sektor agribisnis adalah dibutuhkan.

RANCANG BANGUN SKEMA ASURANSI AGRIBISNIS

Pada dasarnya asuransi pada sektor agribisnis tidak dapat digunakan pada keseluruhan resiko usahatani. Hal ini berkaitan dengan kesulitan dalam pengamanan data aktual ataupun potensi kebangkrutan lembaga asuransi akibat sangat tingginya nilai asuransi yang harus dibayarkan (akibat kegagalan panen yang berskala luas). Senada dengan itu, para petani/peternak yang umumnya menempuh mengurangi resiko dengan diversifikasi, maka keragaan partisipasi petani/peternak untuk membayar premi asuransi harus menjadi pertimbangan dengan seksama.

Menurut Anonim (2009) mengingat ragam komoditasnya sangat bervariasi, konfigurasi hamparan pada umumnya tidak terkonsolidasi, pola temporal siklus produksinya beragam, dan cakupan resikonyanjuga bervariasi; maka sistem asuransi pada sektor agribisnis formal tidak mungkin diterapkan untuk seluruh komoditas dan semua jenis resiko. Dalam tataran praktis, pengembangan asuransi pada sektor agribisnis formal di Indonesia sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga faktor:

1. Sebagian besar pelaku usahatani (petani/peternak) adalah manajer yang dalam pengambilan keputusan usahatannya mempertimbangkan dimensi ekonomi dan sosial budaya.
2. Sebagian besar petani/peternak di Indonesia dengan skala usaha kecil dan seringkali bersifat sebagai part-time farmer. Juga karena mereka belum mengenal asuransi formal.
3. Konfigurasi spasial usaha pertanian umumnya terpecah dan seringkali pola tanamnya beragam, yang akan berimplikasi pada biaya operasional asuransi.

Menurut Nurmanaf dkk (2007) asuransi pada sektor agribisnis adalah suatu institusi ekonomi untuk mengelola resiko yang dihadapi petani/peternak. Secara umum tujuannya adalah: (a) menstabilkan pendapatan petani/peternak melalui pengurangan tingkat kerugian yang

dialami karena kehilangan hasil, (2) merangsang petani/peternak mengadopsi teknologi usahatani; (3) mengurangi resiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani/peternak terhadap lembaga perkreditan. Secara teoritis asuransi merupakan suatu mekanisme penggabungan resiko dan pembagian resiko.

Meskipun demikian, kelayakan suatu resiko untuk diasuransikan tergantung pada tiga faktor, yaitu: probabilitas suatu kejadian yang dapat digunakan untuk klaim tanggungan harus dapat dikuantifikasikan, kejadian-kejadian tersebut haruslah secara substansial tidak berkaitan, dan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tersebut harus layak untuk ditengarai dan dievaluasi.

Disain skema asuransi pada sektor agribisnis membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi pertanian, faktor-faktor sosial ekonomi, dan infrastruktur administrasi. Tentu saja aspek tersebut pada masing-masing negara berbeda, bahkan antar wilayah satu dengan wilayah lainpun bervariasi. Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek yang harus dipahami dengan baik yaitu:

1. Unsur-unsur pokok landasan dasar struktur asuransi pada sektor agribisnis. Dalam hal ini terdapat empat aspek: (a) derajat kelengkapan; dalam arti resiko apa saja yang diasuransikan, apa yang dicakup, dan bagaimana sifatnya (tunggal/majemuk); (b) sektor, apakah publik atautkah privat; (c) pendekatan, apakah individu atautkah area; (d) partisipasi, apakah sukarela (voluntary) atautkah wajib (compulsary).
2. Unsur-unsur kunci yang membentuk skema asuransi pada sektor agribisnis, yakni: (a) petani/peternak sasaran; (b) cakupan komoditas usahatani; (c) cakupan asuransi; (d) nilai premi dan prosedur pengumpulannya; (e) mekanisme penyesuaian kerugian; (f) struktur organisasi terkait dengan skema yang dipilih; (g) skema pendanaan; (h) susunan penjaminan ulang; (i) komunikasi dengan petani/peternak.
3. Prasyarat penunjang. Termasuk dalam hal ini adalah: (a) ketersediaan data yang memadai; (b) ketersediaan personal yang terlatih; (c) pemantauan dan evaluasi; (d) arus informasi, teknologi dan berbagai gagasan untuk penyempurnaan.

Ada berbagai tahapan yang perlu dilalui dalam rangka pengembangan asuransi pada sektor agribisnis, antara lain:

- (a) Membangun sebuah tim multidisiplin yang solid dalam rangka pengembangan asuransi pada sektor agribisnis
- (b) Pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan atau regulasi pemerintah
- (c) Keputusan jenis tanaman/ternak yang tercakup dalam program asuransi
- (d) Analisis permintaan asuransi
- (e) Mengidentifikasi sasaran atau peserta asuransi
- (f) Penentuan resiko yang diasuransikan
- (g) Analisis pilihan model asuransi, administrasi prosedur penilaian kerugian dan penentuan biaya

- (h) Pengukuran besaran premium murni, biaya administratif dan penyesuaian biaya overhead
- (i) Tes program di lapangan atau pilot project
- (j) Evaluasi hasil pilot project dan membuat modifikasi penyesuaian, perbaikan
- (k) Implementasi program secara lebih luas atau mencari program alternatif

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai implikasi dari perubahan iklim, resiko dan ketidakpastian dalam sektor agribisnis, maka upaya mengatasi resiko dan ketidakpastian dapat dilakukan melalui salah satu atau kombinasi dari strategi produksi, strategi pemasaran, strategi finansial, ataupun pemanfaatan kredit informal. Namun upaya demikian dirasakan belum cukup memadai. Pengembangan sistem proteksi formal yang sistemik dan sistematis dalam bentuk asuransi pada sektor agribisnis layak dipertimbangkan, apalagi dihadapkan pada kinerja agribisnis yang ada dan adanya target-target atau sasaran swasembada pada komoditas unggulan strategis nasional.

Pengembangan asuransi sebagai strategi pengembangan agribisnis di Indonesia membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Berpijak pada *existing condition* para pelaku agribisnis, maka asuransi pada sektor agribisnis dapat dikembangkan dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Posisi strategis komoditas agribisnis dalam perekonomian nasional merupakan argumen pokok yang legitimasinya sangat kuat untuk memposisikan asuransi sektor agribisnis sebagai bagian integral kebijakan pembangunan pertanian.

Asuransi agribisnis yang kelak dibangun haruslah layak secara teknis, finansial (ekonomi), dan sosial. Viabilitas ekonomi asuransi pada sektor agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberhasilan menciptakan sistem kelembagaan yang kondusif untuk meminimalkan *moral hazard*. Dalam inisiasi maupun tahap pengembangan, koordinasi lintas disiplin dan lintas sektor sangat dibutuhkan, pendekatan multidisiplin mutlak diperlukan. Proses pembelajaran adalah bagian integral dari pengembangan kelembagaan sistem asuransi pada sektor agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian Di Indonesia. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol 31 No 2 Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Nurmanaf, A.R, Sumaryanto, Sri Wahyuni, E. Ariningsih, Y. Supriatna. 2007. Analisis kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian Pada Usahatani Padi dan Sapi Potong. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Pasaribu, SM., Iwan Setiajie A., Nur Khoiriyah Agustin, EM Lakollo, H. Tarigan, J. Hestina, Y. Supriatna. 2010. Usulan Penelitian Pengembangan Usahatani Padi Untuk Menanggulangi Resiko

Kerugian 75 % Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.

<http://www.bappenas.go.id/node/56/2395/rpjm-2010-2014/>

<http://www.kemendag.go.id>

<http://www.deptan.go.id>

<http://www.kompas.com>

<http://www.bps.com>

Tabloid Berita Resmi Statistik No. 15/03/Th. XIII 1 Maret 2010 Tentang Nilai Ekspor Indonesia.

Badan Pusat Statistik (laporan bulanan data sosial ekonomi edisi 9 bulan Pebruari 2011

Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra (Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan)

Simatupang, IW Rusastra, Saliem, Supriyati, dan Saptana 2003 Prospek Diversifikasi Usaha Tani di Lahan Sawah : Kasus Empat Kabupaten di Jawa